



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF SANTOSO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **272689**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	393.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/135 m2 di KAB / KOTA MERAUKE, HASIL SENDIRI Rp. 393.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	300.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2014, WARISAN Rp. 145.000.000		
3. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	95.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	168.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	157.500.000
Sub Total	Rp.	1.114.000.000
III. HUTANG	Rp.	87.008.300
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.026.991.700

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.